

MENGAPA PENTING MEMPERTAHANKAN PANCASILA

Musdah Mulia

Setiap orang yang mengaku warga negara Indonesia seharusnya sadar bahwa negara tempat dia berpijak adalah sebuah negara-bangsa (*nation-state*) yang demokratis, berbentuk kesatuan sehingga disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara federal, bukan negara kerajaan, dan juga bukan negara agama (*teokratis*). Pemahaman dasar ini perlu selalu ditegaskan sehingga semua warga negara mengerti eksistensi negaranya dengan benar. Penting diketahui, bahwa para *the founding fathers and mothers* Indonesia telah memilih Pancasila sebagai ideologi negara. Indonesia memang unik. Meski mayoritas penduduknya beragama Islam, para pendiri bangsa justru tidak memilih Islam sebagai ideologi negara. Mereka memilih Pancasila yang kelima silanya mengandung nilai-nilai esensial dan universal yang diajarkan oleh semua agama dan kepercayaan yang tumbuh di Indonesia.

Masalahnya bagi kita, Pancasila dalam era lalu menjadi ideologi tertutup dan dipakai lebih banyak untuk kepentingan kelompok penguasa, bukan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Karena itu, tugas kita sekarang melakukan pemaknaan ulang terhadap Pancasila agar menjadi basis bagi pembangunan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat dan tegaknya demokrasi.

Sejumlah upaya perlu dilakukan. Pertama, memperluas kajian Pancasila pada tema-tema kontemporer, seperti demokrasi, HAM, dan kesetaraan gender, civil society dan good governance. Kedua, membangun basis rasionalisme dan penelitian mendalam terhadap gagasan politik Indonesia berdasarkan Pancasila. Ketiga, mentradisikan dialog interaktif dan konstruktif di antara berbagai elemen bangsa sehingga terbangun kesamaan visi melihat Indonesia ke depan.

Karena bangunan politik Indonesia dibangun berdasarkan Pancasila, konsekuensinya ada tiga hal. Pertama, politik Indonesia harus berorientasi pada kemaslahatan, bukan pada kekuasaan semata. Kedua, politik harus menjadikan demokrasi sebagai pilar utama. Kita harus meyakinkan umat beragama, termasuk umat Islam bahwa demokrasi merupakan pilihan terbaik untuk masa kini. Demokrasi sangat sejalan dengan nilai-nilai fundamental Islam, yakni kebebasan berekspresi dengan penuh tanggung jawab, kepemimpinan yang tidak otoriter, keterbukaan dan transparansi keuangan, keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam seluruh proses politik, termasuk kelompok perempuan, persamaan di hadapan hukum, keadilan dan supremasi hukum.

Agar Pancasila sungguh-sungguh dapat menjadi ideologi dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara maka ia harus dimaknai sebagai berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini merupakan rangkuman ajaran teologi dari semua agama dan kepercayaan di Nusantara. Merupakan nilai spiritual yang amat dalam, menyadarkan manusia akan kelemahan dan keterbatasan dirinya sebagai makhluk Tuhan YME. Sila ini mengajarkan agar semua warga negara yang berbeda agama dan kepercayaan dapat hidup bersama secara damai, rukun dan harmonis, serta mengedepankan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila pertama mengandung paling tidak tiga prinsip: Pertama, Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Institusi Agama dipisahkan dari institusi

negara. Keduanya tumbuh secara independen, tetapi memiliki toleransi timbal-balik (*twin toleration*). Kedua, Pemerintah bersikap netral dan adil terhadap semua penganut agama dan kepercayaan. Pemerintah menjamin agar tidak ada warga negara yang mengalami diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan atas nama agama. Ketiga, Pemerintah menjamin agar setiap warga dapat mengekspresikan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing secara aman, nyaman dan bertanggung jawab.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab menjelaskan, Pancasila adalah pedoman negara menuju kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, negara harus tegas mengakui, melindungi dan menghormati hak asasi manusia setiap warga berdasarkan prinsip keadilan dan keadaban. Atas dasar Pancasila, Indonesia telah menerima Deklarasi Universal HAM, meratifikasi sejumlah Kovenan Internasional berkaitan dengan hak-hak sipil politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta mengesahkan sejumlah UU nasional tentang perlindungan HAM.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia menjelaskan Pancasila adalah pedoman negara dalam membangun persatuan Indonesia dalam wadah NKRI. NKRI tidak boleh dibiarkan tercabik dan terluka oleh keinginan segelintir orang atau kelompok yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara agama. NKRI yang demokratis tidak boleh dinodai pikiran sektarian yang mengusung ideologi teokratis dan totalitarianisme dalam bentuk apa pun.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjelaskan, Pancasila adalah pedoman untuk mewujudkan negara demokrasi yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Pancasila adalah pedoman dalam membangun kehidupan politik yang mengutamakan kemaslahatan bukan sekedar kekuasaan. Pancasila mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pancasila mengarahkan negara membangun suatu tatanan sosial yang terbuka, adil dan beradab, serta menisbikan semua perbedaan suku, gender, dan agama. Kerakyatan sbg prinsip kenegaraan berarti kepentingan rakyat (publik) harus menjadi sumber inspirasi dalam pembuatan kebijakan dan perundang-undangan. Pemerintah tidak boleh mengabdikan kpd kepentingan pasar atau kelompok yg kuat.

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia menjelaskan, Pancasila adalah pedoman negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, tugas utama negara seperti terbaca dalam preambule UUD 1945 sangat jelas, yaitu mensejahterahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, negara harus mampu mengeliminasi kemiskinan dan kebodohan, dan selanjutnya membuat seluruh warga negara sejahtera dan cerdas.

Sila kelima ini juga menjelaskan secara tegas dua prinsip: prinsip kesetaraan semua warga negara, dan prinsip penegakan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan, seperti: anak, perempuan, lansia, penderita HIV/Aids, kelompok difable, miskin, minoritas. Keadilan sosial hanya dapat diwujudkan secara konkret bila ada upaya serius terkait pencegahan dan penghapusan kemiskinan; Kesetaraan gender; Distribusi kesempatan pendidikan; Kesempatan yang sama dlm pasar kerja; Jaminan sosial; dan Distribusi pendapatan dan kekayaan.

Hanya dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Indonesia yang maju, damai dan sejahtera akan terwujud dalam realitas nyata. *Wallahu a'lam bi as-shawab.*

